

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, peneliti mengambil kesimpulan:

- a. Pemangku adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat sangat berperan dalam membangun Budaya Damai. Walaupun banyak tantangan dalam melaksanakan peran tersebut, bahwasanya telah dibuktikan bahwa konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat dapat didamaikan berkat peran pemangku adat. peran pemangku adat telah ditunjukkan dengan:
 - a. Secara historis, menetapkan norma-norma adat yang yang menjadi pegangan bagi masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang dalam menciptakan perdamaian.
 - b. Memilih dan menetapkan hakim adat, orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu dalam membangun budaya damai
 - c. Menjamin dan menjaga agar masyarakat adat Dayak menjalankan adat istiadat dengan setia.
 - d. Membentuk organisasi yang berfungsi bagi perkuatnya peran pemangku adat dan tetap terpeliharanya mekanisme adat
 - e. Mewarisi hukum adat dengan membukukannya, untuk pewarisan budaya dan transparansi pelaksanaan hukum

- b. Mekanisme adat merupakan sarana efektif pada masyarakat adat dalam membangun budaya damai di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Unsur-unsur yang mendasarinya adalah:
 - a. Mendapat legitimasi dari masyarakat adat sebagai bagian dari menjalankan adat istiadat Dayak

- b. Mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat yang menguatkan karakter orang Dayak yang mencintai perdamaian dengan pendekatan humanis, pendekatan regulasi dan pendekatan dialog.
- c. Menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat adat melalui peradilan adat.
- d. Dinamis dengan mengakui dan melibatkan aparat hukum negara dalam upaya membangun budaya damai.

5.2 Rekomendasi

Pemangku adat Dayak memiliki kekuatan untuk membangun budaya damai. Sejarah telah membuktikan bahwa pemangku adat berperan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik, sehingga tetap bertahan dalam perubahan sosial.

Mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik dan sumber daya manusia pemangku adat harus dioptimalkan, sehingga semakin berkompeten dalam menyelesaikan konflik. Implementasi dukungan negara yaitu, dengan menjadikan pemangku adat sebagai mitra pemerintah yang saling melengkapi untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Pemerintah secara proaktif melakukan kolaborasi antara penegak hukum public dan pemangku adat dalam menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat. Pemerintah menyediakan payung hukum yang kuat bagi mekanisme adat sehingga mendukung penegakan hukum negara.

Dalam rangka memaksimalkan peran adat istiadat dan peningkatan sumber daya pemangku adat, pemerintah mendukung gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang progresif sudah membangun sekolah adat. Partisipasi pemerintah adalah dengan mendukung dan memasukan unsur muatan lokal yaitu, pendidikan adat

istiadat dalam kurikulum sekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas.

Mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik bukanlah *remidium ultimum*, maka pemangku adat dan mekanisme adat harus membatasi diri dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan adat dan tidak memaksakan mekanisme adat dan norma adat untuk menyelesaikan konflik-konflik di luar otoritas adat. Kearifan lokal mesti memiliki karakter dan kekhasan, sehingga mendapat pengakuan serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal untuk mengembangkan dan membangun budaya damai.